

(Malay)

RP069

Implementasi Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang Pariwisata Study Kasus di Kabupaten Gunungkidul

Sumarni

Universitas Gunung Kidul, INDONESIA

**Corresponding author e-mail: Suci.nazla@gmail.com*

Abstrak

Fenomena munculnya covid-19 telah membuat perubahan yang signifikan di masyarakat mulai dari segi perekonomian, sosial, budaya, pendidikan serta cara kita berpariwisata, hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa kebijakan yang sudah diambil secara cepat di masa pandemic covid-19 diantaranya adalah pembukaan kembali bisnis yang ada di bidang pariwisata dengan menerapkan protocol Kesehatan, ada beberapa SOP yang harus di taati oleh pelaku bisnis pariwisata. Kebijakan ini tentu diikuti oleh implementasi dengan tepat oleh pihak-pihak yang terkait. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menerapkan protocol Kesehatan di sektor pariwisata, metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, Adapun data sekunder diperoleh dari dinas pariwisata kabupaten gunungkidul dan juga pokdarwis Goa Pindul, Pokdarwis Air terjun Bleberan, Pokdarwis Pantai Wediombo dan juga pokdarwis desa wisata Nglanggeran, dan data primer diperoleh dari hasil wawancara di dinas pariwisata, pokdarwis Goa Pindul, Pokdarwis Air terjun Bleberan, Pokdarwis Pantai Wediombo dan juga pokdarwis desa wisata Nglanggeran. Analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan delivery. Implementasi dari kebijakan ini mendapatkan 7 langkah yakni, *pertama* pembuatan SOP *kedua*, sosialisasi tentang SOP yang akan dilaksanakan *ketiga*, memantau pembuatan SOP yang dilakukan oleh POKDARWIS *keempat*, konsolidasi antara pokdarwis dan pemerintah *kelima*, melakukan kunjungan ke lokasi wisata yang sudah mengajukan SOP *keenam* memberikan ijin operasional kepada pokdarwis *ketujuh* monitoring dan evaluasi.

Kata kunci: Implementasi, pariwisata, Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, wisata Gunungkidul, adaptasi kebiasaan baru.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pandemik didunia bukan hal yang baru bahkan di Indonesia khususnya di pulau Jawa juga pernah mengalami pandemic yang disebut Pagebluk (BB Hera, 2020) tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia hampir pernah mengalami pandemic bila kita lihat lagi wabah Justinian yang menewaskan 30-50 juta orang, *black death* yang menelan 25 juta masyarakat, Cacar di Amerika Serikat yang menelan 20% masyarakat, Colera yang menelan 1,3-4 juta masyarakat, flu Spanyol 500 juta orang terinfeksi, sars menginfeksi 8.000 orang dan membunuh 774 orang, Flu Babi menginfeksi 60,8 orang dan pada tahun 2014 ada pandemic Ebola yang menewaskan 11.325 orang, belajar dari sejarah negara-negara yang telah mengalami serangan pandemic untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu yang lama dan masa pemulihan yang cukup menguras tenaga. jumlah korban yang banyak dari adanya pandemic dikarenakan tidak ada penanganan yang serius yang dilakukan oleh pihak pemerintah pada saat itu, disisi lain

juga dikarenakan belum ditemukannya vaksin untuk penyakit tersebut. (Gössling, Scott & Hall, 2020).

Covid-19 (dinyatakan oleh WHO 12 Maret 2020) sebagai pandemic, dan menyebabkan krisis yang besar bahkan lebih besar dari krisis-krisis yang terdahulu, bisnis pariwisata adalah yang terdampak besar dari krisis ini (HigginsDesbiolles, 2020). Hal ini dikarenakan bisnis pariwisata adalah bisnis yang sangat rentan terhadap perubahan (Nugroho, 2018) bahkan Berurusan dengan krisis bukanlah hal baru untuk industri pariwisata (Prayag, 2018), kebijakan penerapan protocol Kesehatan misalnya menjaga jarak sosial, larangan perjalanan dan mobilitas, kampanye tinggal di rumah, karantina mandiri atau wajib, pembatasan kerumunan telah menghambat perjalanan global, pariwisata, dan rekreasi (Novelli, Gussing Burgess, Jones, & Ritchie, 2018), kegiatan pariwisata setelah covid-19 di nyatakan oleh WHO sebagai pandemic kegiatan pariwisata pun berhenti (Nepal, 2020).

Keberadaan covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata salah satu provinsi yang destinasinya sering dikunjungi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) data statistik kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun 2018 sebanyak 26,515,788 orang yang berkunjung ke DIY untuk berpariwisata, namun setelah covid destinasi pariwisata di DIY dinyatakan di tutup, Dinas Pariwisata DIY menyatakan mengalami kerugian sebanyak 81 Miliar per bulan Maret 2020, dan ada 776 jasa usaha yang bergerak dibidang pariwisata baik itu formal maupun informal dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 29,463 orang, dan setengah dari jumlah tersebut dirumahkan dan setengahnya di PHK, jadi sekitar 15 Ribu orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). kondisi ini berbalik pada kondisi tahun pada tahun 2018 dimana pariwisata kabupaten gunungkidul telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp. 25.786.324.803, angka ini akan berbeda dengan kondisi saat ini.

Kondisi ini membuat ekonomi Indonesia menurun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen menurut BPS angka ini paling rendah sejak krisis 1999, oleh sebab itu berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia, diantaranya adalah dengan cara menerapkan aturan Adaptasi Kebiasaan baru sesuai dengan dasar hukum keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemic. Meningkatkan upaya tempat kerja khususnya perkantoran dan industri dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pekerja selama masa pandemi.

Penerapan protocol Kesehatan di bidang pariwisata akan menjadi kunci kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19 (Makalam, 2020), bahkan Penerapan protocol kesehatan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pencegahan penularan covid-19 di lokasi wisata, sehingga ini akan memicu bangkit nya pariwisata di Indonesia (Makarim, 2020), Adapun penerapan protokol kesehatan sesuai dengan standar Cleanes, Health, Safety and Enviromental Sustainability (CHSE) (Makarim, 2020) standar protocol kesehatan ini untuk mendorong kesiapan destinasi pariwisata dalam mengimplementasikan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) (Noviendi, 2020).

Berdasarkan buku panduan kegiatan di lokasi Pariwisata ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh pihak pariwisata agar bisa beroperasi kembali, Adapun persiapannya adalah Pertama sarana dan prasarana mereka harus menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk oleh

pelaksana palanggan adalah alat pendeteksi awal (thermo gun) barang ini akan digunakan di lokasi pintu gerbang masuknya ke lokasi wisata, hal ini berkaitan dengan keputusan selanjutnya bila suhu panas pengunjung lebih dari angka 37,5 maka pengunjung dianjurkan untuk tidak memasuki Kawasan wisata, dan disuruh pulang.

Kedua adalah alat untuk mencuci tangan yang diletakkan dilokasi-lokasi yang strategis, dengan beberapa ketentuan yakni menyediakan sabun dan dengan system air mengalir, ketiga alat penyemprot disinfektan hal ini akan digunakan pada setiap seminggu sekali, hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yakni untuk meliburkan lokasi wisata satu hari selama satu minggu, hal ini digunakan oleh pihak pelaksana pariwisata untuk melakukan perbaikan-perbaikan sara dan prasana, keempat tempat dekontaminasi dan tempat karantina sementara, kelima adalah tempat sampah yang memadai serta yang terakhir adalah poster-poester untuk memperingatkan untuk melakukan penggunaan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.

Selain sarana dan prasana hal yang penting dalam persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam kegiatan pariwisata adalah Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki tugas masing-masing yakni coordinator area destinasi dan usaha jasa pariwisata, kemudian SDM yang bertugas untuk coordinator sub area (parkir, tempat ibadah dan toilet), SDM yang bertugas untuk audio announcer serta SDM yang bertugas untuk mencatat Identitas pengunjung hal ini digunakan untuk tracing bila ditemukan wisatawan yang terinfeksi covid-19.

SOP menjadi salah satu yang diharuskan untuk ditaati oleh penggerak pariwisata, Adapun SOPnya terbagi menjadi 8 bagian dengan rincian *pertama* SOP bagi pengelola, karyawan dan pelaku, *kedua* SOP bagi wisatawan, *ketiga* SOP Fasilitas ibadah, *keempat* SOP area parker, *kelima* area tempat ibadah, *keenam* SOP pengelolaan sampah *keenam* SOP lain yang disesuaikan dengan kondisi destinasi, *ketujuh* SOP parker *kedelapan* Checklist harian.

Protocol kesehatan disetiap lokasi wisata memiliki ketentuan yang berbeda-beda bisa dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1: Ketentuan Umum Protocol Kesehatan Di Lokasi Pariwisata

No	Ketentuan	Wisata Berbasis Goa	Desa Wisata	Kawasan Pantai
1.	Pengunjung dibatasi 100 orang (50% dari kapasitas)	✓	✓	✓
2.	Pembatasan jam Oprasional	✓	✓	
3.	Pembatasan jumlah kelompok, giatan atraksi out bond dll	✓	✓	✓
4.	Pendataan Wisata	✓		
5.	Penyediaan tempat cuci tangan dan kamar mandi sebagai sarana kebersihan	✓	✓	✓
6.	Pengelola menyediakan tempat sterilisasi peralatan yang digunakan	✓	✓	✓
7.	Penyemprotan sisinfektan berkala setiap hari	✓	✓	✓
8.	Pengelola menempatkan petugas khusus penanganan untuk menjaga protocol Kesehatan	✓	✓	✓

9.	Menyusun dan menginformasikan kepada wisatawan dan seluruh penggiat pariwisata	✓	✓	✓
10.	Menjaga kebersihan pantai dengan melaksanakan PHBS	✓	✓	✓
11.	Loket harus membuat pembatas		✓	✓
12.	Dianjurkan untuk menggunakan pembayaran dengan metode online.		✓	✓
13.	Tidak diperkenankan masuk pengunjung dari zona merah		✓	✓
14.	Dianjurkan menerima tamu yang individu, pasangan dan juga keluarga		✓	✓
15.	Wajib menginformasikan terkait protocol Kesehatan kepada wisatan yang berkunjung		✓	✓
16.	Menyediakan alat keras untuk menginformasikan		✓	✓
17.	Memasang alat informasi			✓

Table 2: ketentuan umum protocol Kesehatan usaha jasa periwisata

No	Ketentuan Umum	Penyedia makan dan minum	Akomodasi	Biro Perjalanan
1.	Wajib menjaga hygiene dan sanitasi (menyeprot disimpektan secara berkala setiap hari, membersihkan peralatan makan dan minum, meja dan kursi)	✓	✓	
2.	Memberikan tanda husus pada lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian (ruang ganti, dapur, ddl)	✓		
3.	Membatasi jumlah pengunjung	✓	✓	
4.	Memberi jarak aman untuk lokasi makan	✓		
5.	Wajib menyediakan thermo gun	✓	✓	
6.	Pembatasan jam kunjungan maksimal 2 jam	✓		
7.	Pembatasan jam Oprasional maksiamal 10 jam	✓		
8.	Pengaturan jam kerja untuk karyawan	✓		
9.	Lokasi pembayar (kasir) diwajibnya ada pembatas	✓		
10.	Wajib menyediakan tempat cuci tangan	✓		
11.	Dianjurkan reserpasi dengan online	✓	✓	
12.	Wajib menginformasikan kepada warga sekitar mengenai protocol Kesehatan yang dilakukan	✓		
13.	Wajib memasang media informasi mengenai penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman.	✓	✓	
14.	Membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan ijin oprasional sesuai protocol Kesehatan	✓		

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 15. Pengaturan jarak area parker dengan jarak aman | ✓ | | ✓ |
| 16. Mengatur Jarak aman untuk karyawan | | ✓ | |
| 17. Fokus Pelayanan paket husus untuk individu, pasangan, dan keluarga | | ✓ | ✓ |
| 18. Tim pemandu lapangan harus menggunakan APD pada saat dilapangan | | ✓ | ✓ |
| 19. Wajib menyediakan masker, handsanitizer dalam paket penjualan paket wisata | | | ✓ |
| 20. Tim Pemandu wajib yang sudah mendapatkan pelatihan | | | ✓ |

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan stadi kasus hal ini dikarenakan kebijakan ini berdasarkan intruksi dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, contoh kasus diambil di kabupaten Gunungkidul dengan 4 representasi destinasi wisata yakni Goa Pindul, Air Terjun Srigetuk, Desa Wisata Nglanggeran, dan pantai Baron, keempat ini dipilih dikarenakan keempat lokasi ini sudah mengajukan ijin oprasional, dan sudah melalui tahap uji coba SOP adaptasi kebiasaan baru. Adapun data yang diperoleh dari dinas pariwisata Gunungkidul, Pokdarwis yang ada di lokasi penelitian, serta mendatangi langsung lokasi penelitian untuk dilakuakn triaanggulasi data. Adapun metode menelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Untuk analisisnya penulis menggunakan analisis delivery.

3. PEMBAHASAN

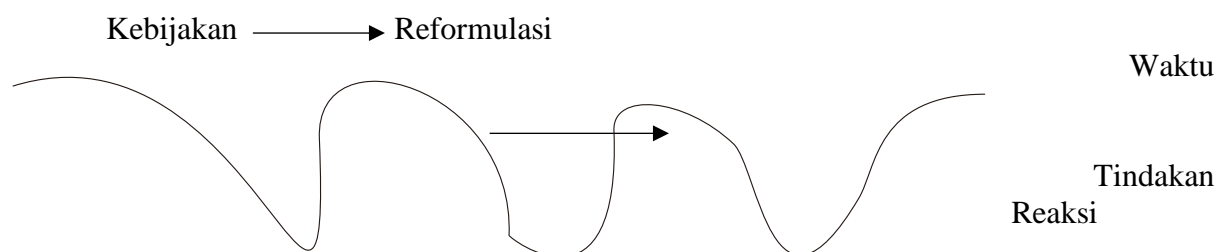
Kebijakan adalah salah satu tugas pemerintah yang tertuang dalam dua bagian yakni membuat kebijakan kemudian mengimplementasikan dalam bentuk pelayanan public (Nugroho, 2018) sedangkan pengertian dari kebijakan ada yang mengartikannya *whatever governments choose to do or not do* (Dye, 2016). Pembuatan kebijakan politik tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan yang baik saja namun juga di tuntut untuk membuat kebijakan yang ideal dalam artian ruang erornya sangat minim bahkan kalo bisa zero defect. Hal ini dikarenakan kebijakan adalah ujung tombak dari sebuah pemerintahan (William, 2003), kita lihat kondisi saat ini seluruh pemerintah dunia membuat kebijakan masing-masing tidak ada negara yang menjadi rujukan yang absolut pada saat penenganan covid-19 (Kamil, 2020) hal ini dikarenakan pandemic covid-19 menyerang bersamaan pada waktu yang sama sehingga bila pemerintah tidak pandai dalam membuat kebijakan baik itu yang mengutamakan Kesehatan maupun memperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang menerapkan adaptasi kebiasaan baru tentu akan membuat perekonomian bangkit lagi bila hal itu di iringi dengan kebijakan yang tepat, namun bila sebaliknya maka kebijakan ini akan menimbulkan potensi penyebaran covid-19 semakin masif dan berbahaya kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan dipertaruhkan, selain juga kebijakan yang ideal tentu harus diiringi dengan implementasi kebijakan yang yang mendukung, pengawasan yang ketat juga akan menentukan pelaksanaan kebijakan ini terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebuah pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan cara-cara yang lain (Nugroho, 2018) Barret dan Fudge menyatakan bahwa untuk

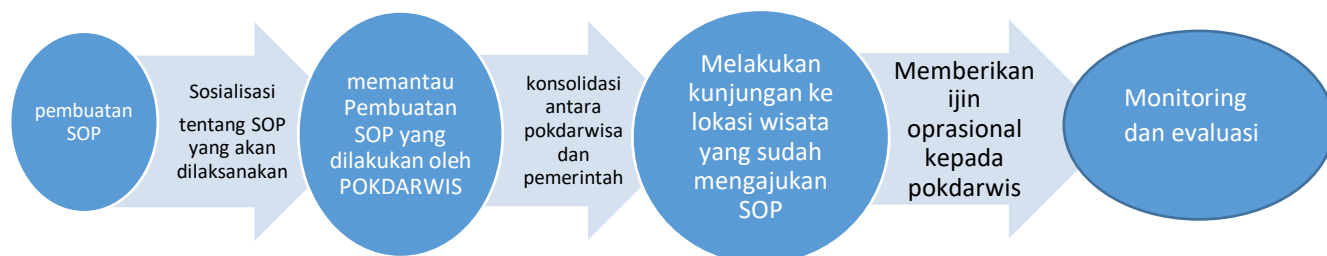
memahami sebuah implementasi dapat melihat dari term “kontinum kebijakan Tindakan” dalam proses interaktif dan negosiasi terjadi disepanjang waktu antara mereka yang melaksanakan kebijakan dan mereka yang tergantung pada pelaksana itu (Barret dan Fudge, 1981: 25)

Gambar 1: Kontinum kebijakan tindakan (Implementasi)



Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada interaksi antara pembuat kebijakan dengan yang melaksanakan kebijakan, implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di bidang pariwisata melalui beberapa tahap yang juga melibatkan atau berinteraksi dengan pihak-pihak yang melaksanakan dilapangan dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata (pokdarwis) mereka yang akan melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, menjadi pemandu, memberikan persetujuan dan legalitas, dalam hal ini juga pemerintah bertugas sebagai monitoring dan evaluasi program kebijkanan ini. Pokdarwis melakukan kebijakan atau mengimplementasikan kebijakan ini berdasarkan kebersamaan dan suka rela (swadaya masyarakat), mereka yang melakukan penyediaan sarana dan prasarana, mereka juga yang menyediakan tempat-tempat untuk mencuci tangan, menyediakan thermo gun serta persiapan-persiapan yang di haruskan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini. Dalam proses persiapan pun mereka mengeluarkan dana dari kas mereka, jadi dalam hal ini pemerintah tidak memberikan dana yang dapat digunakan oleh pokdarwis dalam melaksanakan kebijakan adaptasi kebiasaan baru ini.

Gambar 2: Tahapan-tahapan implementasi kebijakan pemerintah Gunungkidul dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru



Sumber: data Sekunder yang diolah penulis

Proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul husus yang dibidang pariwisata sudah mengalami perkembangan hal ini ditunjukkan dengan jumlah lokasi pariwisata yang setiap hari sudah memiliki ijin oprasional, sampai pada Agustus 2020 ada 13 lokasi destinasi wisata Gunungkidul yang sudah beroperasi dengan mengantongi ijin dari

pemerintah daerah, untuk pendapatan pemerintah gunung kidul dari pembukaan destinasi pariwisata sudah mendapatkan pada bulan Juli sebanyak Rp. 46.150.000 dan pada bulan Agustus mendapatkan Rp.118.682.000 angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang luarbiasa pada bulan pertama diterapkan dengan bulan kedua setelah di terapkan adaptasi kebiasaan baru. Angka ini juga tentu akan semakin meningkat bila tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus baru yang tertulas di lokasi pariwisata.

Proses tahapan pertama adalah pembuatan SOP dalam tahapan ini pemerintah mengikutsertakan serta pihak pihak yang terkait, seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pengelola toko, Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) dan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan protocol kesehatan di wilayah wisata. Pertemuan ini dilakukan dengan menggunakan Zoom, proses ini untuk menjaring pendapat serta menawarkan kebijakan atau system protokol yang akan diterapkan, kegiatan ini diterima oleh semua pihak bahkan ada diantara mereka yang mengapresiasi kebijakan ini, hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa dengan tidak adanya oprasional kegiatan pariwisata maka pendapatan yang mereka terima juga berkurang bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa selama covid-19. SOP ini diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran covid-19 namun juga tidak memutus mata pencarian dibidang pariwisata.

Proses selanjutnya adalah sosialisasi SOP yang dilakukan oleh dinas pariwisata kepada setiap lokasi wisata yang ada di kabupaten gunungkidul, sosialisasinya dengan mengundang kelompok dasar wisata (pokdarwis) secara virtual, ada juga informasi mengenai sosialisasi ini disampaikan melalui WA hal ini bila Pokdarwisnya berhalangan hadir dalam sosialisasi SOP protocol Kesehatan, dalam proses sosialisasi ini dijelaskan bahwa pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan pariwisata, hal ini dikarenakan bila ditemukan ada penularan dilokasi destinasi maka yang bertanggung jawab adakah pihak pelaksana, dengan demikian maka protocol kesehatan dalam memang harus dijalankan bila destinasinya tidak ingin ditutuplagi dikarenakan adanya penularan di lokasi destinasi, dalam sosialisasi ini juga pihak dinas pariwisata menyampaikan ada perbedaan tatan wisata sebelum dan sesudah covid-19, diantara perbedaan itu adalah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) nya harus lebih banyak, sarana dan prasarananya juga harus selalu tersedia.

SOP yang dibuat oleh POKDARWIS harus sesuai dengan destinasi wisatanya, hal ini dikarenakan setiap lokasi wisata berbeda karakteristik potensi penularan covid-19, SOP yang disusun oleh POKDARWIS harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh dinas pariwisata, dalam proses pembuatan SOP semua pihak di tuntun untuk aktif dalam berperan dalam proses pembuatan SOP tersebut, sehingga mereka memang tau tugas dan tanggungjawab yang akan mereka jalankan.

Dalam pembuatan SOP yang harus diperhatikan adalah jumlah SDM yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut hal ini dikarenakan skema pengelolaan sebelum dan sesudah adanya covid-19 jauh berbeda, dimana dalam kegiatan berwisata setelah adanya pandemic covid-19 maka peraturan harus ketat dan memang terlaksana sesuai dengan protocol Kesehatan pada realnya. Tahapan selanjutnya adalah pemerintah harus konsisten dalam memantau proses pembuatan SOP yang dilakukan oleh Pokdarwis sehingga tidak ada gap antara kebijakan dengan implementasi dilapangan, permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tentu tidak jarang munculnya gap antara kebijakan dengan implementasi hal ini tentu harus di hindari dengan cara pengawasan yang ketat dan tegas dalam proses pembuatan SOP, selain memantau proses pembuatan SOP oleh pokdarwis pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan

pokdarwis, tugas sebuah pemerintah dalam konsep New Public Management (NPM) dimana tugas pemerintah *catalytic* yang mempercepat terjadi perubahan dalam hal ini pemerintah bertugas untuk hanya mengarahkan tidak “mendayung” (Ulum, 2018).

Langkah-langkah dalam implementasi kebijakan menjadi salah satu kunci dalam suksesnya kebijakan tersebut, untuk Langkah selanjutnya pemerintah melakukan kroscek ulang atau kunjungan langsung kelapangan, dalam kegiatan ini pengelola pariwisata mengajukan diri untuk dilakukan kunjungan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata, kegiatan ini maka pokdarwis di tuntut untuk aktif dalam menciptakan inisiatif, aktif dalam mengatur dan juga aktif berkomunikasi dengan pihak pemerintah. Dalam proses ini pemerintah memberikan waktu yang Flesibel serta acara komunikasi yang digunakan antara pemerintah dan juga pokdarwis juga tidak bersifat formal, pokdarwis bisa melakukan komunikasi (janjian) melalui sosial media dalam hal ini menggunakan sarana aplikasi WhatsApp.

Proses kunjungan atau pengecekan SOP yang sudah dalam bentuk skema bila ditemukan miss antara SOP yang diajukan dengan SOP yang bernetuk skema lapangan maka destinasi tersebut belum bisa mendapatkan ijin oprasional legal harus melengkapi terdahulu syarat-syarat protocol Kesehatan, namun bila SOP yang di ajukan sesuai dengan SOP yang berbentuk skema maka proses selanjutnya adalah mereka diperbolehkan untuk membuka destinasi mereka secara legal dengan mengantongi ijin oprasional yang diberikan oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Kebijakan adaptasi kebiasaan baru di bidang bisnis diantaranya adalah bidang pariwisata menjadi angin besar bagi pelaku pariwisata disamping itu juga menjadi pengobat kebosanan masyarakat yang sudah hampir 4 bulan tidak melakukan kegiatan diluar rumah, namun kebijakan ini tentu harus diiringi dengan implementasi penerapan kebijakan penerapan protocol Kesehatan yang ketat di destinasi pariwisata, hal ini dikarenakan pennyebaran virus covid-19 masih masif di Indonesia bahkan di dunia. Beberapa Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memantau terlaksananya kebijakan penerapan protocol Kesehatan menjadi kunci suksesnya penerapan protocol Kesehatan, dengan demikian maka potensi penyebaran covid-19 di destinasi pariwisata dapat dihindari, dan perekonomian juga mendapatkan angin segar.

REFERENCES

- Barrett,S C.Fudge. (1981). *policy and Action*. Methuen.
- by Helen Johns and Paul Ormerod . (2008). Happiness, Economics and Public Policy The Institute of Economic Affairs. *springer Science+Busine'*, ISBN: 978 0 255 36600 7, 108.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*. . *Advance online publication*. doi: <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>.
- K., S. (2020). Adventure travel and tourism after COVID-19 – business as usual or opportunity to reset? Nepal, , . *TOURISM GEOGRAPHIES VOL. 22, NO. 3.,* 646–650 <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760926>.
- Novelli,M.,GussingBurgess,L.,Jones,A.,&Ritchie,B.W. (2017). The Ebola induced tourism crisis *AnnalsofTourism Research*,.Understanding and undermine. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160738318300306>, 70,76–87.

- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Pariwisata sebuah pengantar untuk negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Prabawanti, M. A. (2020). *Kunci Kebangkitan Pariwisata Indonesia Ada di Penerapan Protokol Kesehatan*. Jakarta: <https://travel.kompas.com>.
- Prayag, G. (2018). Symbiotic relationship or not? Understanding resilience and crisis management in tourism. , . *Tourism Management Perspectives*, 25, 133–135.
- Stefan Gössling, Daniel Scott & C. Michael Hall. (2019). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *jurnal of sustainable tourism*, 10.1080/09669582.2020.1758708 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>.
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service, Tinjauan Teoritis dan isu-isu Strategi Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemic